Lampiran IV SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

JABATAN : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

TUGAS : Membantu Sekretaris menyiapkan bahan bidang perencanaan, keuangan dan aset, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi bidang perencanaan, keuangan dan aset.

FUNGSI :

1. Penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan;
2. Penataan kelembagaan;
3. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja;
4. Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
5. Penyusunan laporan keuangan
6. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyusun LAKIP Inspektorat Kab. Batola	Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	Lakip Inspektorat menjadi bagian dari keseluruhan Pemerintahan Kabupaten, Formulasi: Dokumen LAKIP yang disusun sesuai ketentuan, dibanding dengan Dokumen yang disusun dibanding dengan rencana yang disusun.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Kasubbag Evlap dan Pelaporan c. Bendahara Pengeluaran
2	Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	Laporan Keuangan Inspektorat , sebagai pertanggungjawaban semua lembaga, atas penggunaan anggaran. Formulasi: Jumlah laporan keuangan yang disusun dibanding dengan rencana dokumen yg disusun keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Bendahara Pengeluaran b. Pengelola/ Penyimpan Barang.
4	Menyusun SOP	Jumlah SOP	SOP adalah dokumen yang menjadi pelengkap untuk panduan pelaksanaan kegiatan. Formulasi: SOP yg disusun dibanding dengan rencana SOP yang disusun secara keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

5	Melakukan Pengadaan Sarana	Jumlah Laptop	Sarpras Laptop penunjang teknologi kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting, pengganti keterbatasan staf. Formulasi: Jumlah laptop yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan laptop keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Printer	Sarpras Printer penunjang kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah Printer yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan Printer keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Kendaraan Roda 4	Sarpras kendaraan Roda Empat sebagai penunjang operasional kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah Kendaraan Roda empat yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan Kendaraan Roda Empat keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Kendaraan Roda 2	Sarpras kendaraan Roda Dua penunjang operasional lapangan kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah kendaraan roda dua yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan kendaraan roda dua keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Meja Kerja	Sarpras meja kerja kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah meja kerja yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan meja kerja keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Kursi Kerja	Sarpras Kursi kerja kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah kursi kerja yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan kursi kerja keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban. I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan

	Jumlah Lemari	Sarpras Lemari arsip kinerja aparaturnya, menjadi komponen sangat penting, sebagai pengamanan dokumen. Formulasi: Jumlah lemari arsip yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan lemari arsip keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban. I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
--	---------------	--	---	--

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran V SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

- JABATAN** : **Kasub Bag Umum Kepegawaian**
- TUGAS** : Membantu Sekretaris menyiapkan bahan bidang umum dan kepegawaian serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi bidang umum dan kepegawaian.
- FUNGSI** : 1. Pelaksanaan Penatausahaan Surat Menyurat;
 2. Pengelolaan Perlengkapan kantor;
 3. Pengelolaan Ketatalaksanaan Perkantoran;
 4. Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 5. Pembinaan Sikap Perilaku dan Disiplin Pegawai;
 6. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 7. Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Setiap Pegawai;
 8. Pelayanan Pengelolaan Kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Peningkatan kuualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan, melalui Diklat Substansi. Formulasinya: peserta yang mengikuti Diklat dibanding dengan jumlah ASN keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian

2	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan melalui Diklat penjurangan. Formulasinya: peserta yang mengikuti Diklat Penjurangan dibanding dengan jumlah PFT keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
3	Melaksanakan Pelatihan Dikantor Sendiri	Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan melalui PDS. Formulasinya: peserta yang mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri dibanding dengan jumlah Pengawas keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
4	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus OTT pada Tim Saber Pungli Kabupaten Barito Kuala.	Persentase OTT Yang Selesai Ditindaklanjuti	OTT yang dilakukan oleh APH, dilimpahkan ke APIP, menjadi bagian tugas Inspektorat, hasil OTT yang ditindaklanjuti merupakan hasil kinerja pemberantasan Korupsi. Formulasinya: OTT yang selesai ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah OTT yang dilimpahkan X 100 %	Kasub Bag Umum Kepegawaian	APH

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran VI SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

- JABATAN** : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan.
TUGAS : Membantu Sekretaris menyiapkan bahan bidang evaluasi dan Pelaporan, serta melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi bidang evaluasi dan pelaporan.
FUNGSI : 1. Penyusunan rencana operasional pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan;
 2. Pelaksanaan operasionalisasi evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan melalui inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan di daerah;
 3. Penyiapan bahan administrasi laporan pengawasan, pengaduan-pengaduan masyarakat,
 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Melakukan Monitoring TLHP APIP	Jumlah LHM TLHP APIP Sesuai ketentuan	LHM TLHP APIP menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin percepatan penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD. Formulasinya: Realisasi LHM sesuai ketentuan dibanding dengan target LHM yang ditetapkan dalam PKPT.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
		Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan	KKP TLHP APIP menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin percepatan penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD. Formulasinya: Realisasi KKP TLHP sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP TLHP yang ditetapkan dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
2	Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi	Temuan APIP Penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga perlu mediasi oleh Inspektorat. Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai melalui mediasi dibanding dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai sebelum mediasi	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Rapat/Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan APIP.
3	Melakukan Monitoring TLHP BPK RI	Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan	LHM TLHP BPK RI dokumen penting untuk menjamin dalam upaya rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi LHM TLHP BPK RI yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHM TLHP BPK RI yang tercantum dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan

		Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan	KKP TLHP BPK RI dokumen penting untuk menjamin dalam upaya rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi KKP TLHP BPK RI yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP TLHP BPK RI yang tercantum dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
4	Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi	Temuan BPK RI Penyelesaian TLHP BPK RI antara SKPD dengan BPK RI, perlu Mediasi karena BPK tidak dapat menerima langsung dari SPKP yang bersangkutan, sehingga perlu mediasi oleh Inspektorat. Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai melalui dimediasi dibanding dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai sebelum mediasi.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Hasil Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP dengan BPK RI
5	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tim Sinergitas Kabupaten Barito KUALA	Persentase Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat dari APH Selesai Ditindaklanjuti	Pelimpahan Kasus pengaduan masyarakat dari APH yang dilimpahkan ke Inspektorat ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi Pelimpahan Kasus dari APH yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah pelimpahan kasus dari APH	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	APH
6	Menyusun Laporan Inkhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Barito Kuala sesuai ketentuan	Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat, menjadi bagian kinerja Inspektorat terhadap pengawasan intern lembaga. Formulasinya: Jumlah laporan ikhtisar pengawasan dibagi jumlah laporan yang direncanakan keseluruhannya.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran VII SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

- JABATAN** : Auditor.
TUGAS : Membantu Inspektur Melakukan Pengawasan Keuangan dan Kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
FUNGSI :
1. Pelaksanaan Audit Keuangan
 2. Pelaksanaan Audit Kinerja
 3. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
 4. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD
 5. Pelaksanaan Reviu RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
 6. Pelaksanaan Reviu Renstra SKPD
 7. Pelaksanaan Reviu RKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
 8. Pelaksanaan Reviu RKA SKPD
 9. Pelaksanaan Reviu LKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
 10. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP SKPD
 11. Pelaksanaan Evaluasi SPIP SKPD
 12. Pemeriksaan Khusus/Investigatif.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	LHR RKA SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Jumlah Realisasi LHR RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	KKP Reviu RKA menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP Reviu RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
2	Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Ketentuan	LHR LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.

		Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab.Batola sesuai ketentuan	KKP Reviu LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
3	Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan	LHR SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi LHR SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	KKP Evaluasi SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
4	Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola	Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan	LHR RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan kualitas Dokumen RPJMD. Formulasinya: Realisasi LHR RPJMD Pemda pada Bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan targer LHR RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan	KKP Reviu RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RPJMD untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RPJMD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Reviu RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
5	Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra SKPD untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi LHR Renstra pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR Renstra yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu Renstra SKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu Renstra SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
6	Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	LHR RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun, baik murni maupun perubahan Formulasinya: Realisasi LHR RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	KKP Reviu RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKPD yang tercantum dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

7	Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHP Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya kinerja SKPD untuk setiap tahun. Formulasinya: Realisasi LHA Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai ketentuan	KKP Audit Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya pelaksanaan Kinerja setiap tahun. Formulasinya: Realisasi KKA Audit Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding target KKA Audit Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
8	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Operasional dibanding dengan target LHA Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Operasional dibanding dengan target KKP Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
9	Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan	LHA Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target LHA Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan	KKP Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target KKP Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
10	Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	LHA Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	KKP Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
11	Melakukan Audit Probitas	Jumlah Laporan Probitas Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probitas menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Laporan Audit Probitas yang sesuai ketentuan dibanding dengan target Laporan Audit Probitas yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Probitas Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probitas menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Audit Probitas yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Audit Probitas yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

12	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHR LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
13	Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan	LHR LK SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
14	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	LHP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan LHP yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus/Kasus X 100 %	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Persentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan.	KKP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Realisasi Penerbitan KKP Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan KKP Khusus yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus X 100 %	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
15	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHE pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHE dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

16	Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD	Jumlah Satgas SPIP SKPD Yang dibina	Satgas SPIP SKPD yang dibina dibanding dengan SPIP SKPD keseluruhannya.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Laporan dari Irbn I, II, III dan IV.
----	---	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------------

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran VIII SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

- JABATAN** : Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
TUGAS : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan Keuangan.
FUNGSI : 1. Pelaksanaan Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan:
 a. Urusan Wajib
 b. Urusan Pilihan
 2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan:
 a. Pelaksanaan Pengawasan Administrasi Umum
 b. Pelaksanaan Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan
 c. Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 d. Pelaksanaan Pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 e. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 3. Evaluasi SPIP SKPD.
 4. Pemeriksaan Khusus/Investigatif

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	LHR RKA SKPD menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Jumlah Realisasi LHR RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	KKP Reviu RKA menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP Reviu RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD

2	Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHR LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	KKP Reviu LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
3	Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan	LHR SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi LHR SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	KKP Evaluasi SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
4	Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola	Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan	LHR RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan kualitas Dok.RPJMD. Formulasinya: Realisasi LHR RPJMD Pemda pada Bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan	KKP Reviu RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RPJMD untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RPJMD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Reviu RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
5	Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra SKPD untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi LHR Renstra pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR Renstra yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu Renstra SKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu Renstra SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD

6	Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	LHR RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun, baik murni maupun perubahan. Formulasinya: Realisasi LHR RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	KKP Reviu RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKPD yang tercantum dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
7	Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHP Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya kinerja SKPD untuk setiap tahun. Formulasinya: Realisasi LHA Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai ketentuan	KKP Audit Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya pelaksanaan Kinerja setiap tahun. Formulasinya: Realisasi KKA Audit Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding target KKA Audit Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
8	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Operasional dibanding dengan target LHA Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Operasional dibanding dengan target KKP Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
9	Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan	LHA Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target LHA Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan	KKP Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target KKP Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD

10	Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	LHA Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan taraget LHA Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	KKP Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan taraget KKP Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
11	Melakukan Probity Audit	Jumlah Laporan Probity Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probity menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Laporan Audit Probity yang sesuai ketentuan dibanding dengan target Laporan Audit Probity yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Probity Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probity menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Audit Probity yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Audit Probity yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
12	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHR LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
13	Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan	LHR LK SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD

14	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	LHP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan LHP yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus/Kasus X 100 %	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Persentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	KKP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Realisasi Penerbitan KKP Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan KKP Khusus yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus X 100 %	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
15	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHE pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
16	Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD	Jumlah Satgas SPIP SKPD Yang dibina	Satgas SPIP SKPD yang dibina dibanding dengan SPIP SKPD keseluruhannya.	P2UPD Muda/Madya.	Laporan dari Irbn I, II, III dan IV.

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002